

# Pengukuran Kemampuan Kabupaten/Kota untuk Pencapaian Target Indikator Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tatag Wibiseno<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Korespondensi: \* [tatag\\_wib@yahoo.com](mailto:tatag_wib@yahoo.com)

---

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i3.193> | halaman: 254-273

---

Dikirim: 21-11-2022 | Diterima: 29-11-2023 | Dipublikasikan: 30-11-2023

---

## Abstrak

Makalah ini mengeksplorasi pengukuran kemampuan Kabupaten/Kota dalam mencapai target indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Fokus utama penelitian adalah pada empat indikator makro, yakni Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penurunan Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dalam konteks implementasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah, artikel ini menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota, terutama dalam periode evaluasi tahun 2019-2021. Faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan pusat, dan peristiwa luar biasa seperti pandemi Covid-19, memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika pencapaian target. Upaya perbaikan dan adaptasi kebijakan di tengah kendala-kendala ini juga menjadi sorotan penelitian. Melalui analisis *gap* antara target awal dan target yang diperbarui, artikel ini mengidentifikasi sejauh mana Kabupaten/Kota optimis atau pesimis dalam pencapaian indikator makro. Hasil pengukuran kemampuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis untuk penyusunan kebijakan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, mendukung visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) *quickwin*: Kawasan Industri (KI) Brebes, KI Terpadu Batang, KI Kendal, dan Kawasan Pariwisata Borobudur, serta beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dominan yang diharapkan Kabupaten/Kota tempat lokasi akan memperbaiki indikator makro. Dari 35 Kabupaten/Kota terdapat 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yang optimis, 6 (enam) Kabupaten/Kota yang pesimis, dan 6 (enam) Kabupaten/Kota yang seimbang. Dari 6 Kabupaten yang pesimis yaitu Kabupaten Brebes, Kudus, Wonosobo, Magelang, Karanganyar, dan Wonosobo, hanya Kabupaten Brebes dan Magelang yang akan mendapat dukungan pusat sepenuhnya untuk mewujudkan peran *quickwin*, untuk mengangkat PE sebesar 7 % Jawa Tengah.

**Kata kunci:** Pertumbuhan Ekonomi (PE); Indeks Pembangunan Manusia (IPM); angka kemiskinan; pengangguran; kebijakan pembangunan; pandemi Covid-19; daya lenting; pesimis atau optimis.

---

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Pencapaian target indikator pembangunan merupakan aspek yang krusial dalam mengevaluasi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu entitas pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan pengelolaan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman utama bagi kabupaten/kota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan utama bagi setiap kabupaten/kota di provinsi ini dalam merancang langkah-langkah pembangunan yang strategis. Pada tingkat yang lebih spesifik, evaluasi kemampuan kabupaten/kota dalam mencapai target indikator pembangunan menjadi kunci untuk memahami progres pembangunan regional dan memberikan arah kebijakan yang lebih tepat.

Pentingnya pengukuran kemampuan kabupaten/kota dalam mencapai target indikator pembangunan tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Makalah ini mengurai dan menganalisis berbagai aspek krusial pembangunan di tingkat lokal, dengan fokus pada empat indikator makro, Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penurunan Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Melalui pemetaan pencapaian target indikator pembangunan di tingkat kabupaten/kota, pemerintah dapat mengidentifikasi perbedaan-perbedaan signifikan, memahami faktor-faktor pendorong keberhasilan atau kegagalan, serta menyusun rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan potensi pembangunan di setiap wilayah. Makalah ini tidak hanya menjadi laporan evaluatif, tetapi juga menjadi panduan berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum yang peduli terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2022, menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagaimana diatur dalam Perda Jateng No. 5 Tahun 2019, menjadi tahap kritis yang memerlukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pencapaian target 4 (empat) indikator makro. Dalam kerangka ini, pengendalian dan pengawasan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam Bab VII Arahan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah yang selaras dengan tema setiap Wilayah Pengembangan (WP) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 (Bappeda Jateng, 2019). Keempat indikator tersebut saling terkait satu dengan lainnya, sehingga pemerintah harus mengusahakan agar pertumbuhan ekonomi lebih meningkat, masyarakat terbebas dari kemiskinan dan dapat hidup jauh lebih layak dengan IPM terus meningkat (Junaidi dan Bhakti, 2019)

Pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mengimplementasikan program RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pemerintah pusat pada periode Tahun 2019-2021 mengambil langkah percepatan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Jawa Tengah sebesar 7%. Langkah ini didukung oleh pembangunan infrastruktur, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 79 Tahun 2019, Perpres No. 109 Tahun 2020, dan Perpres No. 18 Tahun 2020 yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Namun, implementasi program tersebut terhambat oleh wabah pandemi Covid-19 yang mulai melanda pada Maret 2020. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi untuk pencegahan penyebaran wabah tersebut menyebabkan kontraksi pada Pertumbuhan Ekonomi

(PE), peningkatan angka kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta menghambat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Fahrika dan Roy, 2020). Pandemi ini memporak-porandakan perencanaan program dan kegiatan di berbagai sektor dan wilayah.

Untuk menghadapi dampak tersebut, kebijakan rasionalisasi dilakukan, diikuti dengan inisiasi pengalihan dan penyesuaian kegiatan inovatif. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemampuan daya lenting yang lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun kondisi ekonomi mengalami guncangan, akhir tahun 2021 menunjukkan perbaikan seiring dengan stabilnya pasar keuangan domestik dan pulihnya beberapa sektor perekonomian (Modjo, 2020). Meskipun masih dihantui oleh adanya mutasi Covid-19 menjadi varian omicron, langkah-langkah pelonggaran pembatasan aktivitas dilakukan dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi secara masif.

Dalam menyesuaikan target pembangunan di tengah kondisi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga alternatif kebijakan perencanaan jangka menengah. Pilihan tersebut antara tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana baru yang didasarkan pada asumsi yang diperbaharui (Muhyiddin, 2020). Setelah pertimbangan situasi yang mulai membaik, disepakati bahwa target indikator makro dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 masih dianggap optimis tercapai dengan melakukan penyesuaian target indikator makro di tingkat Kabupaten/Kota. Rapat Koordinasi Teknis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Surakarta pada Maret 2022 menyepakati penyesuaian target indikator makro untuk mencapai target RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Penentuan strategi dan arah kebijakan daerah ke depan didasarkan pada identifikasi gap indikator makro antara capaian tahun 2019 dan 2021, daya lenting kabupaten/kota terhadap peluang dan tantangan, serta gap hasil penyesuaian target antara tahun 2021 dan 2023. Sinergitas hasil identifikasi ini dengan kemajuan pelaksanaan kegiatan pusat dan pemerintah provinsi di tingkat kabupaten/kota menjadi dasar pertimbangan. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi diharapkan akan menjamin keterpaduan antara kegiatan pusat dan daerah, membaiknya besaran indikator makro, dan mendukung capaian target indikator makro kabupaten/kota. Upaya percepatan capaian target indikator makro Provinsi Jawa Tengah juga terkait dengan kebijakan delapan Wilayah Pengembangan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dalam tiga kawasan wilayah *quickwin*, diinisiasi oleh pemerintah pusat dan berdampak pada penataan ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah serta sinergi dengan Bab VII RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

## 1.2. Perumusan Masalah

Sebagai respon terhadap upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19, pemerintah tetap melanjutkan implementasi rencana pembangunan sesuai tahapannya. Dalam konteks ini, pemantauan dan pengendalian dinamika perubahan permasalahan, peluang, dan tantangan menjadi penting untuk mendukung percepatan capaian indikator makro. Fokus utama adalah memahami capaian dan *gap* target dari perencanaan indikator makro pada tahun 2021. Dalam upaya mempertahankan target pembangunan tahun 2023, penyesuaian target indikator makro di 35 kabupaten/kota dilakukan, dan perlu juga untuk menganalisis *gap* antara capaian target indikator makro pada tahun 2021 dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2023.

Keterbatasan sumber daya pembangunan menjadi tantangan, dan pengenalan sejauhmana capaian target indikator makro kabupaten/kota bersifat pesimis atau optimis menjadi kunci dalam

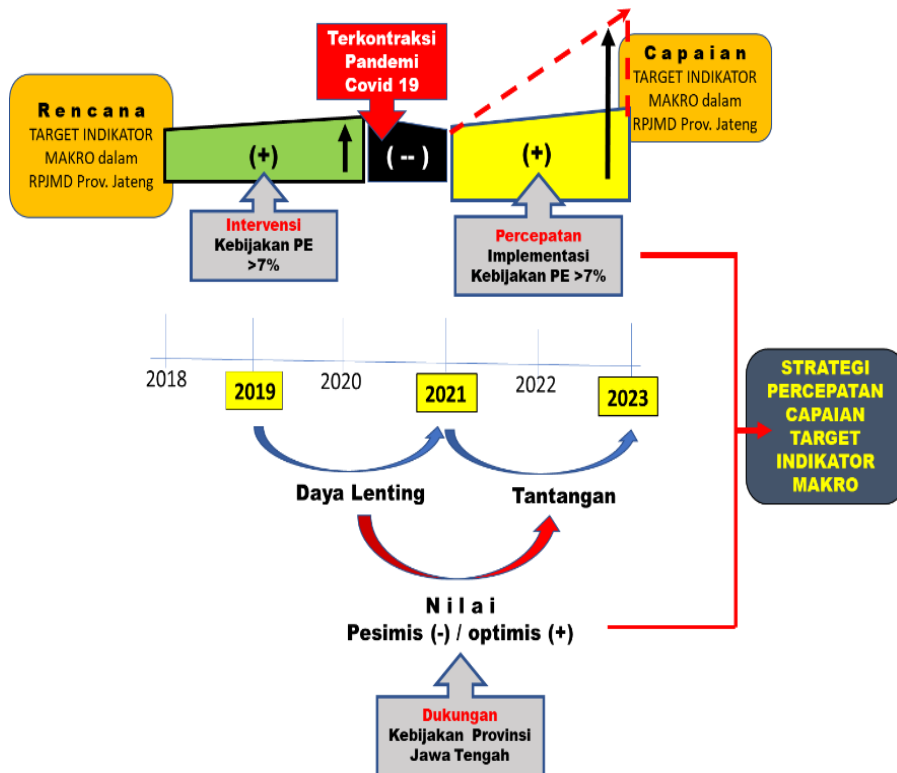
merumuskan strategi dan arah kebijakan prioritas ke depan. Pemahaman yang holistik ini diperlukan untuk memastikan formulasi kebijakan yang terpadu, seimbang, dan berkelanjutan guna mendukung proses pembangunan yang efektif dan responsif terhadap dinamika perubahan kondisi eksternal dan internal.

### 1.3. Metode

Metode pengkajian dilaksanakan proses pengumpulan data sekunder dari BPS, identifikasi perkembangan perwilayahan, dan analisis deskriptif kualitatif untuk persandingan capaian keempat indikator makro per Kabupaten/Kota dalam Bab. VII dari RPJMD Prov. Jateng dan perhitungan gap capaian Tahun 2019 dan 2021 dengan gap target Tahun 2021 dan 2023 untuk mengasumsikan besaran kemampuan optimis dan pesimis kemampuan masing-masing kabupaten/kota untuk mencapai target indikator makro yang telah disepakati. Hasil pengukuran optimis atau pesimis tersebut akan menjadi dasar menyeimbangkan untuk pengalokasian dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten sesuai dengan kewenangannya, serta sejalan dengan perkembangan capaian pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional.

### 1.4. Kerangka Kerja Logis

Fokus utama kerangka kerja logis (*logical framework*) adalah pemantauan dan pengendalian dinamika perubahan permasalahan, peluang, dan tantangan yang muncul sebagai dampak dari pandemi. Upaya ini menjadi kunci untuk mendukung percepatan capaian indikator makro yang diharapkan.



Gambar 1. Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*)

Langkah pertama adalah memahami capaian dan gap target dari perencanaan indikator makro pada tahun 2021. Analisis ini mencakup evaluasi pencapaian terhadap tujuan dan keluaran

yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi pemulihan, dilakukan penyesuaian target indikator makro di 35 kabupaten/kota. Proses ini melibatkan perubahan dalam kegiatan atau strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, perlu dilakukan analisis gap antara capaian target indikator makro pada tahun 2021 dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2023. Hal ini membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan selanjutnya.

## II. Kajian Capaian dan Target Indikator Makro

### 2.1. Kajian Status Perencanaan Tata Ruang.

Status ketetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/kota menjadi mendasar yang kuat mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan suatu wilayah, utamanya Penetapan setelah ditetapkan dalam Perpres No. 79 Tahun 2019 (Presiden 2019) pada tanggal 20 November 2019, Perpres No. 109 Tahun 2020 (Presiden 2020a) pada tanggal 17 November 2020, dan Perpres No. 18 Tahun 2020 (RPJMN Tahun 2020-2024) (Presiden 2020b) pada tanggal 20 Januari 2020.

Tabel 1. Progres Legislasi Perda RTRW Kabupaten/Kota (Per 6 April 2022)

Quikwin	Wilayah Pengembangan	Kabupaten/ Kota	Penetapan Revisi RTRW Kab./Kota	RDTR Kab./Kota	
				Penetapan RDTR	Proses Penetapan RDTR
KI Brebes	Bregasmalang	Kab. Brebes	Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Brebes 2019 – 2039. (23 Des 2019)		
		Kab. Tegal			
		Kota Tegal	Perda No.1 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Tegal 2011 – 2031 ( 31 Feb 2021)		
	Petanglong	Kab. Pemalang	Perda 1 Tahun 2018 tentang RTRW Pemalang 2018 – 2038 (8 Feb 2018)		RDTR Kaw Perkotaan Pemalang
		Kab. Pekalongan	Perda 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Pekalongan 2020 - 2040 (5 Agustus 2020)		Perbup Pekalongan 21/2021 tentang RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
		Kota Pekalongan	Perda 9 Tahun 2020 tentang RTRW Kota Pekalongan 2009 - 2029		
	Barling mascakep	Kab. Batang	Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Batang 2019 – 2039. (26 Des 2019)	Perda Kab Batang No.6 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Tulis Th. 2020 - 2040	RDTR Kec Limpung
		Kab. Banjarnegara			RDTR Gringsing
		Kab. Purkalingga	Perda 10 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Purkalingga 2011 - 2031 (28 Agustus 2020)	Perbup Purkalingga 46/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purkalingga Tahun 2021 - 2041 (10 Juni 2021)	RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari
	KI Kendal	Warakuti	Kab. Banyumas		Perda Kab Banyumas No.6 Tahun 2019 tentang RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto Th. 2019 - 2039
Kab. Cilacap			Perda 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Cilacap 2011 - 2031 (1 April 2021)	Perbup Cilacap 75/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 - 2041 (9 Juni 2021)	RDTR Kawasan Perkotaan Kroya RDTR Kawasan Perkotaan Mbos RDTR Kawasan Perkotaan Mbjenang RDTR Kawasan Perkotaan Dayeuhluhur RDTR Kawasan Perkotaan Sidareja
Kab. Kebumen					
Kab. Grobogan			Perda No.12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021- 2041 (17 Des 2021)		
KI Kendal	Kedungsepur	Kab. Demak	Perda No.1 Tahun 2020 tentang RTRW Kab. Demak Tahun 2011 - 2031 ( 26 Februari 2020)		
		Kab. Semarang			
		Kab. Kendal	Perda 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Kendal tahun 2011 – 2031 ( 22 Mei 2020)		
	Banglor	Kota Semarang	Perda No. 5 Th 2021 tentang RTRW Kota Semarang 2011 - 2031		belum melakukan pengujian berkendala dengan RTRW Kota
		Kota Salatiga		Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018 tentang RDTR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030	
		Kab. Jepara		Perbup Jepara No55 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021)	
Banglor	Warakuti	Kab. Kudus	Perda No. 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (30 Maret 2022)	RDTR Kawasan Perkotaan Jekeulo	
		Kab. Pati	Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Pati 2010 - 2030 (1 April 2021)		
	Kab. Blora	Perda 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Blora 2021 - 2041 ( 1 April 2021)			
		Kab. Pemalang			

KI Kendal	Kedungsepur	Kab. Grobogan	Perda No.12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021- 2041 (17 Des 2021)		
		Kab. Demak	Perda No.1 Tahun 2020 tentang RTRW Kab. Demak Tahun 2011 - 2031 ( 26 Februari 2020)		
		Kab. Semarang			
		Kab. Kendal	Perda 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Kendal tahun 2011 – 2031 ( 22 Mei 2020)		
	Kota Semarang	Perda No. 5 Th 2021 tentang RTRW Kota Semarang 2011 - 2031		belum melakukan pengajuan terkendala dengan RTRW Kota	
	Kota Salatiga		Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018 tentang RDR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030		
	Wanarakati	Kab. Jepara		Perbup Jepara No 55 Tahun 2021 tentang RDR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021)	
Kab. Kudus		Perda No. 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022- 2042 (30 Maret 2022)	RDR Kawasan Perkotaan Jekulo		
Kab. Pati		Perda No. 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Pati 2010 - 2030 (1 April 2021)			
Banglor	Kab. Blora	Perda 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Blora 2021 - 2041 (1 April 2021)			
	Kab. Rembang				
Kaws Pariwisata Borobudur	Purwomanggung	Kab. Purworejo	Perda No.10 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Purworejo 2021 - 2041 (30 Juli 2021)	Perbup No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutacario Tahun 2022- 2041	
		Kab. Wonosobo			
		Kab. Magelang			
		Kab. Temanggung			
	Kota Magelang	Perda 2 Tahun 2020 tentang RTRW Kota Magelang 2011 - 2031 (17 Juli 2020)			
	Subosuka wonosraten	Kab. Boyolali	Perda 8 Th 2019 tentang RTRW Boyolali 2011 – 2031, (17 Juli 2019)	Perbup 77/2021 tentang RDR Kec. Sawit Tahun 2021 - 2041 (12 November 2021)	RDR Wilayah Perencanaan Mojosoongo
		Kab. Sukoharjo	Perda 1 Th 2018 tentang RTRW Sukoharjo 2011 – 2031, (9 Maret 2018)	Perbup 91/2020 tentang RDR Kaw Perkotaan Kec. Sukoharjo Tahun 2020- 2039 Perbup 93/2020 tentang RDR Kaw Perkotaan Kec Kartasura Tahun 2020 - 2039 Perbup 92/2020 tentang RDR Kaw Perkotaan Kec Grogol Tahun 2020 - 2039	
Kab. Karanganyar		Perda 19 Th 2019 tentang RTRW Karanganyar 2013 – 2032, (27 Agust 2019)			
Kab. Wonogiri	Perda No. 2 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Wonogiri 2020 - 2040				
Kab. Sragen	Perda 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Sragen Th. 2011 – 2031 tanggal 15 Mei 2020	Perbup 69 Tahun 2021 tentang RDR Kawasan Perkotaan Sragen (22 Desember 2021)	RDR OSS Kawasan Kota Industri Sambungmacan-Gondang		
Kab. KlATEN	Perda No. 10 tahun 2021 tentang RTRW Kab. KlATEN Th. 2021- 2041 (24 Nov 2021)		RDR Kecamatan Karangdowo RDR Kecamatan Gantiw RDR Kecamatan Bayat		
Kota Surakarta	Perda No. 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021 - 2041 (9 Juli 2021)				

## 2.2. Gap Capaian Tahun 2019 dan 2021

Dengan asumsi bahwa implementasi capaian indikator makro antara Tahun 2019- 2021 PE berkontraksi sehingga negatif karena kebijakan pembatasan aktivitas/kegiatan untuk menekan pertumbuhan jumlah korban pandemi covid 19, disisi lain implementasi pembangunan quickwin tetap diupayakan berjalan dengan harapan untuk menekan laju kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran.

**Tabel 2.** Kecenderungan Capaian Indikator Makro Tahun 2019- 2021

Indikator Makro	Ukuran Nilai Terbaik	Kecenderungan
PE	Gap Kecil (-)	<—
IPM	Gab Besar (+)	—>
Kemiskinan)	Gap Kecil (+)	—>
TPT	Gap Kecil (+)	—>

Tabel 3: Gap Capaian Tahun 2019 dan 2021

Quikwin	Wilayah Pengeembangan	Kabupaten/Kota	PE			Nilai IPM			Kemiskinan (%)			TPT (%)		
			2021	2023	Gap	2021	2023	Gap	2021	2023	Gap	2021	2023	Gap
KI Brebes	Bregasmalang	Kab. Brebes	2,33	5,33	3,00	66,32	67,55	1,23	17,43	17,00	-0,43	9,78	7,28	-2,50
		Kab. Tegal	3,72	5,35	1,63	68,79	70,13	1,34	8,40	8,05	-0,35	9,97	9,14	-0,83
		Kota Tegal	3,12	5,50	2,38	75,52	75,85	0,33	8,12	6,99	-1,13	8,25	7,70	-0,55
		Kab. Pemalang	4,19	4,50	0,31	66,56	68,17	1,61	16,56	15,39	-1,17	6,71	5,20	-1,51
	Petanglong	Kab Pekalongan	3,54	4,50	0,96	70,11	70,71	0,60	10,57	9,61	-0,96	4,28	4,00	-0,28
		Kota Pekalongan	3,59	4,20	0,61	75,40	75,60	0,20	7,59	6,45	-1,14	6,89	6,10	-0,79
		Kab. Batang	4,88	4,90	0,02	68,92	69,66	0,74	9,68	7,98	-1,70	6,59	5,93	-0,66
		Kab Banjarnegara	3,26	5,50	2,24	67,86	68,34	0,48	16,23	14,35	-1,88	5,86	5,00	-0,86
	Barling mascakep	Kab. Purbalingga	3,19	5,00	1,81	69,15	70,01	0,86	16,24	14,00	-2,24	6,05	5,50	-0,55
		Kab. Banyumas	4,00	5,00	1,00	72,44	72,58	0,14	13,66	11,00	-2,66	6,05	4,50	-1,55
		Kab. Cilacap	2,15	5,15	3,00	70,42	71,26	0,84	11,67	10,97	-0,70	9,97	7,91	-2,06
		Kab. Kebumen	3,71	5,50	1,79	70,05	71,00	0,95	17,83	16,00	-1,83	6,03	5,50	-0,53
KI Kendal	Kedungsepur	Kab. Grobogan	3,78	5,00	1,22	70,41	71,43	1,02	12,74	10,46	-2,28	4,38	4,00	-0,38
		Kab. Demak	2,62	4,79	2,17	72,57	73,51	0,94	12,92	11,52	-1,40	5,28	4,28	-1,00
		Kab. Semarang	3,63	5,30	1,67	74,24	74,80	0,56	7,82	5,35	-2,47	5,02	4,00	-1,02
		Kab. Kendal	3,89	5,64	1,75	72,50	73,70	1,20	10,24	8,39	-1,85	7,55	5,63	-1,92
		Kota Semarang	5,16	6,10	0,94	83,55	84,00	0,45	4,56	4,04	-0,52	9,54	8,30	-1,24
		Kab. Sukatiga	3,33	5,44	2,11	83,60	84,56	0,96	5,14	4,59	-0,55	7,25	5,51	-1,74
	Wanarakuti	Kab. Jepara	4,63	6,00	1,37	72,26	73,35	1,09	7,44	7,10	-0,34	4,23	3,85	-0,38
		Kab. Kudus	-1,98	3,16	5,14	75,16	75,97	0,81	7,60	6,35	-1,25	3,77	3,40	-0,37
		Kab. Pati	3,38	4,82	1,44	72,28	73,49	1,21	10,21	10,00	-0,21	4,60	4,00	-0,60
		Banglor	Kab. Blora	3,58	5,53	1,95	69,37	69,44	0,07	12,39	11,12	-1,27	3,81	2,60
Kaws Parwisata Borobudur	Purwomanggung	Kab. Purworejo	3,38	5,00	1,62	72,98	73,76	0,78	12,40	9,86	-2,54	3,59	3,45	-0,14
		Kab. Wonosobo	3,68	4,50	0,82	68,43	69,72	1,29	17,67	14,75	-2,92	5,26	3,25	-2,01
		Kab. Magelang	3,48	4,80	1,32	70,12	71,03	0,91	11,91	9,92	-1,99	5,03	2,40	-2,63
		Kab. Temanggung	3,34	4,80	1,46	69,88	70,49	0,61	10,17	9,80	-0,37	2,62	2,62	0,00
	Subosuka wonosraten	Kota Magelang	3,20	5,14	1,94	79,43	81,25	1,82	7,75	6,41	-1,34	8,73	6,30	-2,43
		Kab. Boyolali	4,63	5,40	0,77	74,40	75,80	1,40	10,62	9,68	-0,94	5,09	4,03	-1,06
		Kab. Sukoharjo	3,82	4,90	1,08	77,12	78,00	0,88	8,23	7,50	-0,73	3,32	2,05	-1,27
		Kab. Karanganyar	3,57	5,00	1,43	75,99	76,50	0,51	10,68	8,96	-1,72	5,59	2,80	-2,79
		Kab. Wonogiri	3,35	5,50	2,15	70,49	71,51	1,02	11,55	9,39	-2,16	2,43	2,43	0,00
		Kab. Sragen	3,75	5,30	1,55	74,08	74,72	0,64	13,83	11,73	-2,10	4,76	4,07	-0,69
Kab. Klaten	3,82	4,51	0,69	76,12	76,88	0,76	13,49	12,89	-0,60	5,48	5,00	-0,48		
Kota Surakarta	4,01	5,48	1,47	82,62	83,56	0,94	9,40	7,89	-1,51	7,85	6,20	-1,65		

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022 - BPS(BPS 2022)

Untuk memberikan kesetaraan dilakukan pembobotan dalam interval 5 (lima) antara antara yang tertinggi dan terendah gap absolutnya. Besaran bobot terbagi : (1) Sangat Rendah; (2) Rendah; (3) Sedang; (4) Tinggi; (5) Sangat Tinggi.

Tabel 4: Pembobotan Indikator Makro 2019-2021

Interval	PE	IPM	Kemiskinan	TPT
	-0,99	0,17	0,24	1,08
5	-0,12 -1,11	0,76 0,93	0,29 0,53	-0,36 0,72
4	-1,11 -2,10	0,60 0,76	0,53 0,76	0,72 1,80
3	-2,10 -3,09	0,43 0,60	0,76 1,00	1,80 2,88
2	-3,09 -4,08	0,27 0,43	1,00 1,23	2,88 3,96
1	-4,08 -5,07	0,10 0,27	1,23 1,47	3,96 5,04

Hasil Perhitungan Gap Capaian Indikator Makro 2019-2021 dan Quick Win dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5:** Perhitungan Gap Capaian 2019 – 2021 dan Quick Win

Quickwin	Wilayah Pengembangan	Kabupaten/Kota	Pertmb PE 2019 - 2021	BOBOT PE	Pertmb IPM 2019 - 2021	BOBOT IPM	Pertmb KEMSKI NAN	BOBOT KEMSKI NAN	Pertmb TPT 2019 - 2021	BOBOT TPT	JML BOBOT				
KI Brebes	Bregasmalang	Kab. Brebes	3,00	3	1,23	4	-0,43	1	-2,50	5	13	41	113		
		Kab. Tegal	1,63	2	1,34	4	-0,35	1	-0,83	2	9				
		Kota Tegal	2,38	3	0,33	1	-1,13	2	-0,55	1	7				
		Kab. Pemalang	0,31	1	1,61	5	-1,17	3	-1,51	3	12				
	Petanglong	Kab. Pekalongan	0,96	1	0,60	2	-0,96	2	-0,28	1	6	21			
		Kota Pekalongan	0,61	1	0,20	1	-1,14	3	-0,79	2	7				
		Kab. Batang	0,02	1	0,74	2	-1,70	3	-0,66	2	8				
	Barlingmascapek	Kab. Banjarnegara	2,24	3	0,48	2	-1,88	4	-0,86	2	11	51			
		Kab. Purbalingga	1,81	2	0,86	3	-2,24	4	-0,55	1	10				
		Kab. Banyumas	1,00	1	0,14	1	-2,66	5	-1,55	3	10				
		Kab. Cilacap	3,00	3	0,84	3	-0,70	1	-2,06	4	11				
		Kab. Kebumen	1,79	2	0,95	3	-1,83	3	-0,53	1	9				
KI Kendal	Kedungsepur	Kab. Grobogan	1,22	2	1,02	3	-2,28	4	-0,38	1	10	64	110		
		Kab. Demak	2,17	3	0,94	3	-1,40	3	-1,00	2	11				
		Kab. Semarang	1,67	2	0,56	2	-2,47	5	-1,02	2	11				
		Kab. Kendal	1,75	2	1,20	4	-1,85	4	-1,92	4	14				
		Kota Semarang	0,94	1	0,45	2	-0,52	1	-1,24	3	7				
		Kota Salatiga	2,11	3	0,96	3	-0,55	1	-1,74	4	11				
	Wanarakuti	Kab. Jepara	1,37	2	1,09	3	-0,34	1	-0,38	1	7	27			
		Kab. Kudus	5,14	5	0,81	3	-1,25	2	-0,37	1	11				
		Kab. Pati	1,44	2	1,21	4	-0,21	1	-0,60	2	9				
	Banglor	Kab. Blora	1,95	2	0,07	1	-1,27	2	-1,21	3	8	19			
		Kab. Rembang	1,02	1	1,18	4	-2,43	5	-0,09	1	11				
	Kaws Pariwisata Borobudur	Purwo mangung	Kab. Purworejo	1,62	2	0,78	3	-2,54	5	-0,14	1	11		58	126
			Kab. Wonosobo	0,82	1	1,29	4	-2,92	5	-2,01	4	14			
Kab. Magelang			1,32	2	0,91	3	-1,99	4	-2,63	5	14				
Kab. Temanggung			1,46	2	0,61	2	-0,37	1	0,00	1	6				
Kota Magelang			1,94	2	1,82	5	-1,34	3	-2,43	3	13				
Subosuka wonosraten		Kab. Boyolali	0,77	1	1,40	4	-0,94	2	-1,06	2	9	68			
		Kab. Sukoharjo	1,08	2	0,88	3	-0,73	1	-1,27	3	9				
		Kab. Karanganyar	1,48	2	0,51	2	-1,72	3	-2,79	5	12				
		Kab. Wonogiri	2,15	3	1,02	3	-2,16	4	0,00	5	15				
		Kab. Sragen	1,55	2	0,64	2	-2,10	1	-0,69	2	7				
		Kab. Klaten	0,69	1	0,76	2	-0,60	1	-0,48	1	5				
Kota Surakarta	1,47	2	0,94	3	-1,51	3	-1,65	3	11						

Berdasarkan Hasil Pembobotan Gap Capaian Tahun 2019 dan 2021 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5. menunjukkan bahwa:

1. *Quickwin* Kawasan Pariwisata Borobudur memiliki daya lenting yang lebih baik dari pada quickwin KI Brebes – Batang dan KI Kendal, meskipun WP Purwomanggung sebagai pusat quickwin candi Borobudur di Kabupaten Magelang memiliki daya lenting lebih buruk daripada WP Subosukowonosraten (sebagai WP pendukungnya) dengan pusat aktivitas perekonomian di Kota Surakarta sebagai PKN.

### Perkembangan pembangunan *Quickwin* Kawasan Pariwisata Borobudur

Penataan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur dan wilayah Joglosemar menekankan perlunya penanganan berkelanjutan yang mengintegrasikan rencana induk secara terpadu. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah penting dalam membentuk DPSP Borobudur sebagai destinasi pariwisata berkualitas (Yanita Petriella, 2021). Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diharapkan meningkatkan pelayanan bagi wisatawan dengan pembangunan infrastruktur yang menggambarkan nuansa kebudayaan Jawa, termasuk perbaikan akses jalan dan



fasilitas di radius 7 kilometer dari Borobudur. Langkah-langkah termasuk penyediaan air bersih, pengelolaan sampah regional, prasarana pengendali banjir, anjungan cerdas, dan pembangunan gerbang serta fasilitas lainnya. Penataan akses poros Mendut-Pawon-Borobudur juga menjadi bagian integral dari transformasi ini.

PT Brantas Abipraya (Persero) dipercaya mengendalikan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur untuk pelaksanaan **Proyek Strategis Nasional (PSN)** dengan rincian pembangunan (Abipraya 2021), seperti pembangunan :

- a. **Gerbang Palbapang** sebagai penanda kawasan dari arah Yogyakarta, jaraknya dari Candi Borobudur pun sejauh 8 km, memiliki ikon patung singa yang dilengkapi *hall* atau ruang serbaguna, ruang pengelola atau *security* dan MEP (*Mechanical Electrical & Plumbing*), toilet dan lansekap taman.
- b. **Gerbang Blondo sebagai** pintu masuk wisatawan Borobudur dari arah Semarang, jaraknya dari Candi Borobudur kurang lebih sejauh 10 KM., dihiasi ikon berupa imej Pohon Kalpataru yang dipercaya sebagai pohon hayat atau pohon kehidupan dan harapan yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti, tempat beribadah (mushola), toilet, *bike station*, ruang MEP dan pengelola juga area parkir.
- c. **Gerbang Kembang Limus.** berukuran paling besar dengan luas 2 hektar sebagai penanda kawasan dari arah Purworejo, sekaligus menghidupkan Balkondes (Balai Ekonomi Desa) di Desa Kembang Limus yang memiliki fasilitas pendukung yang dapat digunakan sebagai *hall* multi fungsi dan area parkir bus, *serta* akan dilengkapi dengan tempat pengelolaan sampah dengan teknologi TPS3R yaitu sistem pengelolaan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah.
- d. **Penataan Jalur Aksis Budaya: Mendut - Pawon – Borobudur.** meliputi pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Bojong, Jalur Pejalan Kaki Tepian Kali Progo (*Skywalk*), Koridor Jalan Balaputradewa serta Penataan Sendang Lanang dan Wadon Wanurejo. Jalanan ini pun kini menjadi viral di Magelang. Jalan di sepanjang permukiman warga menjadi semakin elon dengan dihiasi lampu jalanan yang klasik.

#### Sharing perwujudan *Quickwin* Kawasan Pariwisata Borobudur

- a. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksi nilai infrastruktur dasar proyek tersebut sebesar Rp. 350 triliun menggerakkan ekonomi, membangkitkan harapan, semangat masyarakat terdampak pandemi covid 19 dengan agenda eco tourism dan sport tourism yang tetap memenuhi disiplin protokol kesehatan (Subarkah 2021)
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan Borobudur untuk menjaga kelestariannya sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (World Heritage Site). Kementerian PUPR telah melakukan stimulant dan pendampingan pembangunan sebanyak 785 pondok wisata (homestay). (Newswire 2021)
- c. Pengelolaan Sampah Regional : Kebutuhan lahan 13,55 Ha (2,82 Ha milik PT. Perhutani, 10,73 Ha milik masyarakat), Pembebasan lahan diusulkan APBD Pemprov Jateng 54 M. Sedangkan Pembangunan TPS Regional dan akses jalan menuju TPS Regional agar didukung Kemen PUPR.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung percepatan pencapaian indikator makro yang telah selesai:

- a. Jalan dan jembatan yakni Pembangunan Jembatan Kali Progo, Rehabilitasi Jalan KSPN Borobudur, Preservasi Jalan Keprekan – Borobudur, Preservasi Jalan

- Pringsurat – Secang – Keprekan, Jalan Keprekan – Muntilan – Salam (Bts. DIY), Jalan Yogyakarta-Tempel-Pakem-Prambanan, dan Jalan Sentolo – Nanggulan – Dekso.
- b. Perumahan, Kementerian PUPR telah melakukan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata (Sarhunta) melalui program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya. Terdapat 821 rumah yang mendapat bantuan Sarhunta. Bantuan tersebut berupa peningkatan kualitas rumah dengan fungsi homestay dan usaha pariwisata lainnya untuk 382 unit rumah di 15 desa. Kemudian bantuan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya tanpa fungsi usaha untuk 439 unit rumah di empat desa.
  - c. Permukiman telah diselesaikan Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) KSPN Borobudur, Pengembangan KSPN Borobudur Gerbang Klangan Kabupaten Kulon Progo, Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Mendukung KSPN Borobudur dan Penataan Kawasan Permukiman KSPN Borobudur.
  - d. Daya lenting *quickwin* KI Brebes dan KI Terpadu Batang yang paling tinggi pada WP Barlingmascakeb disusul WP Bregasmalang sebagai wilayah KI Brebes – Kabupaten Brebes dan WP Petanglong sebagai wilayah KI Terpadu Batang. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten lingkup WP Barlingmascakeb ternyata memiliki daya lenting yang lebih baik dari pada WP Bregasmalang dan Petanglong yang merupakan Kawasan permukiman perkotaan, meskipun besaran angka kemiskinannya masih termasuk paling tinggi di Jawa Tengah. Ke depan kondisi ini akan lebih baik apabila akses hubungan daerah keluar melalui Bandara JB. Sudirman semakin baik dan lancar.
2. KI Brebes ditargetkan menjadi core-industry untuk sektor industri tekstil dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki, industri makanan dan minuman, industri mebel, serta industri farmasi dan alat kesehatan. KI Wijayakusuma yang mendapatkan penugasan untuk menjadi pengembang dan pengelola Kawasan Industri Baru (KIB) di dua tempat, yaitu KI Brebes dan KI Terpadu Batang. Hingga saat ini progres pembangunan Kawasan Industri Brebes tetap berjalan dalam progres finalisasi master plan, feasibility study and Business Plan seluas 3.976 Hektar, Kajian master plan konseptual seluas 3.976 hektar, kajian amdal seluas 3.976 hektar, survey geologi dan topografi seluas 1.000 hektar (Jateng 2021). Hambatan pelaksanaan pada proses pembebasan lahan belum dilakukan karena pemerintah pusat belum memiliki anggaran yang direlokasi untuk penanganan Covid-19.

Berbeda dengan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Batang lebih memungkinkan untuk segera dimulai karena sudah tersedia lahan milik PT Perkebunan Nusantara. KIT Batang berada di Kecamatan Banyuputih Desa Kedawung direncanakan seluas kurang lebih 4.300 Ha berada di lahan PTPN IX serta sebagiannya seluas sekitar 450 Ha masuk dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Batang sesuai PERDA Kabupaten Batang No. 13 Tahun 2019 terkait dengan Revisi RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019 – 2039.

KI Brebes akan dibangun di lahan dengan luas 3.967 hektar di Kecamatan Bulakamba, Losari dan Tanjung diarahkan menjadi kota mandiri yang ramah lingkungan dan investasi. Rencana pengembangan dibagi dalam 3 Klaster (Pipit Ika Ramadhani, 2020) yaitu Klaster 1 seluas 3.100 hektar akan dilakukan pengembangan Industrial Estate dan Industrial Township (Distrik Kreasi); Klaster 2 seluas 800 hektar akan digunakan untuk pengembangan Pusat Inovasi & Township (Distrik Inovasi); Klaster 3 seluas 400 hektar akan digunakan untuk pengembangan Pusat Rekreasi & Township.

Kawasan industri Batang adalah kawasan yang peruntukannya untuk industri terdiri dari Zona 1 ± 158 hektar dan Zona 2 ± 176 hektar, dengan total luas ± 334 hektar dan Zona 3 kawasan peruntukan permukiman perkotaan, komersil – transit-oriented development (TOD) ± 116 hektar. Sisa lahan yang berada di luar Zona 1, 2 dan 3 diperlukan perubahan kesesuaian tata ruang oleh kementerian dan lembaga terkait seluar ± 3.992,8 hektar. Kebutuhan infrastruktur penunjang diantaranya reaktivasi jalur Kereta Api Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas dan kebutuhan pembangunan Dry Port, serta konektivitas antara sumber gas dengan kawasan industri untuk memenuhi kebutuhan gas. (KPPIP, 2021.).

KIT Batang telah pembentukan konsorsium pengelola kawasan industri yang terdiri dari tiga Perusahaan BUMN yaitu PT. Pembangunan Perumahan (PP) menangani infrastruktur, PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) mengelola kawasan industri, dan PT Perkebunan Nasional (PTPN) IX menyediakan lahan. (Stefy Thenu 2020). Selain itu dukung kementerian, lembaga dan BUMN, serta stakeholder yang lain sebagai supporting seperti jajaran Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, PUPR, Perindustrian, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, Bina Marga, Pelindo, PLN, Pertamina, KAI, Pemerintah provinsi Jateng dan Pemerintah Kabupaten Batang.

Kementerian PUPR berencana membuka exit tol dengan harapan bisa langsung akses ke kawasan industri. Exit tol yang ada tersedia berjarak 16 Km menuju kawasan industri, urusan listrik menjadi tanggung jawab PLN, dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator untuk menugaskan PT KAI sebagai operator merevitalisasi jalur kereta api dengan fokus Stasiun Plabuan di Ketanggan, Gringsing, Batang serta menyiapkan dry port.

3. *Quickwin* KI Kendal yang bersanding dengan Kota Semarang sebagai Pusat Kegiatan Nasional Kedungsepur menguatkan daya lenting WP Kedungsepur, semakin ke timur (menjauh) semakin melemah daya lentingnya dimulai dari WP Wanarakuti sampai dengan dan WP Banglor. Ke depan kondisi ini akan lebih baik apabila akses hubungan daerah keluar melalui Bandara Ngloram semakin baik dan lancar.

### **Perkembangan Pembangunan Kawasan Industri Kendal**

Potensi KI Kendal diawali dengan penetapan PP No. 85 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal sejak 21 April 2020, hingga saat ini investasi telah mencapai Rp 27 triliun. Investasi tersebut berasal dari 75 pelaku usaha dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, dan Hongkong, serta termasuk juga investor dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa KEK Kendal berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan membuat model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri berteknologi tinggi (Komalasari 2022)

Saat ini telah ditetapkan perpres No. 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kedungsepur, yang perjelas ketidaksesuaian rencana pola pemanfaatan ruang di Pantai Utara Kabupaten Kendal dalam Perpres No. 78 Tahun 2017, sehingga memperjelas status kepemilikan lahan para investor, seperti PT. SEAFER terikat dengan MoU Pemerintah Pusat dengan Cina selama 20 tahun mendatang. Rencana Pengembangan kawasan industri PT. SEAFER akan dilakukan konsep “green” yaitu diantaranya dengan

- Pengelolaan lingkungan dengan menerapkan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan
- Pengelolaan air yang mempertimbangkan konsep daya lingkungan dan daya tampung dengan pengelolaan water recycling system.
- Penyediaan air baku akan dikoordinasikan dengan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.
- Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
- Pelaksanaan pengembangan kawasan industri baja akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### 2.3. Gap Capaian antara Tahun 2021 dan Target Tahun 2023

Dengan asumsi bahwa pencapaian akhir indikator makro pada Tahun 2023 harus tercapai meskipun meskipun harus mengalami penyesuaian karena proses pemulihan pasca pandemi covid 19 dan intervensi kebijakan pusat. kecenderungan Target Tahun 2023 dengan, bahwa :

**Tabel 6:** Kecenderungan Capaian Indikator Makro Tahun 2021- 2023

Indikator Makro	Ukuran Nilai Terbaik	Kecenderungan
PE	Gab Besar (+)	→
IPM	Gab Besar (+)	→
Kemiskinan	Gap Besar (-)	←
TPT	Gap Besar (-)	←

Gap capaian indikator makro tahun 2021-2023 dan Quick Win dari 3 (tiga) Kawasan dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7:** Gap Capaian Indikator Makro Tahun 2021 dan 2023

Quikwin	Wilayah Pengembangan	Kabupaten/kota	PE			Nilai IPM			Kemiskinan (%)			TPT (%)		
			2021	2023	Gap	2021	2023	Gap	2021	2023	Gap	2021	2023	Gap
KI Brebes	Bregasmalang	Kab. Brebes	2,33	5,33	3,00	66,32	67,55	1,23	17,43	17,00	-0,43	9,78	7,28	-2,50
		Kab. Tegal	3,72	5,35	1,63	68,79	70,13	1,34	8,40	8,05	-0,35	9,97	9,14	-0,83
		Kota Tegal	3,12	5,50	2,38	75,52	75,85	0,33	8,12	6,99	-1,13	8,25	7,70	-0,55
		Kab. Pemalang	4,19	4,50	0,31	66,56	68,17	1,61	16,56	15,39	-1,17	6,71	5,20	-1,51
		Kab. Pekalongan	3,54	4,50	0,96	70,11	70,71	0,60	10,57	9,61	-0,96	4,28	4,00	-0,28
		Kota Pekalongan	3,59	4,20	0,61	75,40	75,60	0,20	7,59	6,45	-1,14	6,89	6,10	-0,79
	Petanglong	Kab. Batang	4,88	4,90	0,02	68,92	69,66	0,74	9,68	7,98	-1,70	6,59	5,93	-0,66
		Kab. Banjarnegara	3,26	5,50	2,24	67,86	68,24	0,48	16,23	14,35	-1,88	5,86	5,00	-0,86
		Kab. Purbalangga	3,19	5,00	1,81	69,15	70,01	0,86	16,24	14,00	-2,24	6,05	5,50	-0,55
		Kab. Banyumas	4,00	5,00	1,00	72,44	72,58	0,14	13,66	11,00	-2,66	6,05	4,50	-1,55
		Kab. Cilacap	2,15	5,15	3,00	70,42	71,26	0,84	11,67	10,97	-0,70	9,97	7,91	-2,06
		Kab. Kebumen	3,71	5,50	1,79	70,05	71,00	0,95	17,83	16,00	-1,83	6,03	5,50	-0,53
KI Kendal	Kedungsepur	Kab. Grobogan	3,78	5,00	1,22	70,41	71,43	1,02	12,74	10,46	-2,28	4,28	4,00	-0,28
		Kab. Demak	2,62	4,79	2,17	72,57	73,51	0,94	12,92	11,52	-1,40	5,28	4,28	-1,00
		Kab. Semarang	3,63	5,30	1,67	74,24	74,80	0,56	7,82	5,35	-2,47	5,02	4,00	-1,02
		Kab. Kendal	3,89	5,64	1,75	72,50	73,70	1,20	10,24	8,39	-1,85	7,55	5,63	-1,92
		Kota Semarang	5,16	6,10	0,94	83,55	84,00	0,45	4,56	4,04	-0,52	9,54	8,30	-1,24
		Kab. Salabiga	3,33	5,44	2,11	83,60	84,56	0,96	5,14	4,59	-0,55	7,25	5,51	-1,74
	Wanarakuti	Kab. Jepara	4,63	6,00	1,37	72,26	73,35	1,09	7,44	7,10	-0,34	4,23	3,85	-0,38
		Kab. Kudus	-1,98	3,16	5,14	75,16	75,97	0,81	7,60	6,35	-1,25	3,77	3,40	-0,37
		Kab. Pati	3,38	4,82	1,44	72,28	73,49	1,21	10,21	10,00	-0,21	4,60	4,00	-0,60
		Kab. Blora	3,58	5,53	1,95	69,37	69,44	0,07	12,39	11,12	-1,27	3,81	2,60	-1,21
		Kab. Rembang	3,85	4,87	1,02	70,43	71,61	1,18	15,80	13,37	-2,43	3,67	3,58	-0,09
		Kab. Purworejo	3,38	5,00	1,62	72,88	73,76	0,78	12,40	9,86	-2,54	3,59	3,45	-0,14
Kaws Pariwisata Borobudur	Subosuka wonosraten	Kab. Wonosobo	3,68	4,50	0,82	68,43	69,72	1,29	17,67	14,75	-2,92	5,26	3,25	-2,01
		Kab. Magelang	3,48	4,80	1,32	70,12	71,03	0,91	11,91	9,92	-1,99	5,03	2,40	-2,63
		Kab. Temanggung	3,24	4,80	1,46	69,88	70,49	0,61	10,17	9,80	-0,37	2,62	2,62	0,00
		Kota Magelang	3,20	5,14	1,94	79,43	81,25	1,82	7,75	6,41	-1,34	8,73	6,30	-2,43
		Kab. Boyolali	4,63	5,40	0,77	74,40	75,80	1,40	10,62	9,68	-0,94	5,09	4,03	-1,06
		Kab. Sukoharjo	3,82	4,90	1,08	77,12	78,00	0,88	8,23	7,50	-0,73	3,32	2,05	-1,27
Subosuka wonosraten	Kab. Karanganyar	3,57	5,00	1,43	75,99	76,50	0,51	10,68	8,96	-1,72	5,59	2,80	-2,79	
	Kab. Wonogiri	3,35	5,50	2,15	70,49	71,51	1,02	11,55	9,39	-2,16	2,43	2,43	0,00	
	Kab. Sragen	3,75	5,30	1,55	74,08	74,72	0,64	13,83	11,73	-2,10	4,76	4,07	-0,69	
	Kab. KlATEN	3,82	4,51	0,69	76,12	76,88	0,76	13,49	12,89	-0,60	5,48	5,00	-0,48	
	Kota Surakarta	4,01	5,48	1,47	82,62	83,56	0,94	9,40	7,89	-1,51	7,85	6,20	-1,65	

**Sumber Data:** Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022 – BPS (BPS 2022) dan RPJMD Prov. Jateng Tahun 2019-2023 (Perda Jateng No. 5 Th. 2019 2019)

Untuk memberikan kesetaraan dilakukan pembobotan dalam interval 5 (lima) antara antara yang tertinggi dan terendah gap absolutnya. Besaran bobot terbagi : (1) Sangat Rendah; (2) Rendah; (3) Sedang; (4) Tinggi; (5) Sangat Tinggi.

**Tabel 8:** Pembobotan Indikator Makro 2011-2023

Interval	PE		IPM		Kemiskinan		TPT	
	1,02		0,35		-0,54		-0,57	
5	4,12	5,14	1,47	1,82	-2,38	-2,92	-2,26	-2,83
4	3,09	4,12	1,12	1,47	-1,84	-2,38	-1,70	-2,26
3	2,07	3,09	0,77	1,12	-1,29	-1,84	-1,13	-1,70
2	1,04	2,07	0,42	0,77	-0,75	-1,29	-0,57	-1,13
1	0,02	1,04	0,07	0,42	-0,21	-0,75	0,00	-0,57

Hasil Perhitungan Gap Capaian Indikator Makro 2021-2023 dan Quick Win dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9:** Perhitungan Gap Capaian 2021 – 2023 dan Quick Win

Quikwin	Wilayah Pengembangan	Kabupaten/Kota	Gap PE 2021-2023	BOBOT PE	Gap IPM 2021-2023	BOBOT IPM	Gap A.MISKIN 2021-2023	BOBOT KEMISKINAN	Gap TPT 2021-2023	BOBOT TPT	JML BOBOT		
KI Brebes	Bregasmalang	Kab. Brebes	3,00	3	1,23	4	-0,43	1	-2,50	5	13	41	113
		Kab. Tegal	1,63	2	1,34	4	-0,35	1	-0,83	2	9		
		Kota Tegal	2,38	3	0,33	1	-1,13	2	-0,55	1	7		
		Kab. Pemalang	0,31	1	1,61	5	-1,17	3	-1,51	3	12		
	Petanglong	Kab Pekalongan	0,96	1	0,60	2	-0,96	2	-0,28	1	6	21	
		Kota Pekalongan	0,61	1	0,20	1	-1,14	3	-0,79	2	7		
		Kab. Batang	0,02	1	0,74	2	-1,70	3	-0,66	2	8		
	Barling mascakep	Kab Banjarnegara	2,24	3	0,48	2	-1,88	4	-0,86	2	11	51	
		Kab. Purbalingga	1,81	2	0,86	3	-2,24	4	-0,55	1	10		
		Kab. Banyumas	1,00	1	0,14	1	-2,66	5	-1,55	3	10		
Kab. Cilacap		3,00	3	0,84	3	-0,70	1	-2,06	4	11			
Kab. Kebumen		1,79	2	0,95	3	-1,83	3	-0,53	1	9			
KI Kendal	Kedungsepur	Kab. Grobogan	1,22	2	1,02	3	-2,28	4	-0,38	1	10	64	110
		Kab. Demak	2,17	3	0,94	3	-1,40	3	-1,00	2	11		
		Kab. Semarang	1,67	2	0,56	2	-2,47	5	-1,02	2	11		
		Kab. Kendal	1,75	2	1,20	4	-1,85	4	-1,92	4	14		
		Kota Semarang	0,94	1	0,45	2	-0,52	1	-1,24	3	7		
	Kota Salatiga	2,11	3	0,96	3	-0,55	1	-1,74	4	11			
	Wanarakuti	Kab. Jepara	1,37	2	1,09	3	-0,34	1	-0,38	1	7	27	
		Kab. Kudus	5,14	5	0,81	3	-1,25	2	-0,37	1	11		
		Kab. Pati	1,44	2	1,21	4	-0,21	1	-0,60	2	9		
	Banglor	Kab. Blora	1,95	2	0,07	1	-1,27	2	-1,21	3	8	19	
Kab. Rembang		1,02	1	1,18	4	-2,43	5	-0,09	1	11			
Kaws Pariwisata Borobudur	Purwo manggung	Kab. Purworejo	1,62	2	0,78	3	-2,54	5	-0,14	1	11	58	126
		Kab. Wonosobo	0,82	1	1,29	4	-2,92	5	-2,01	4	14		
		Kab. Magelang	1,32	2	0,91	3	-1,99	4	-2,63	5	14		
		Kab. Temanggung	1,46	2	0,61	2	-0,37	1	0,00	1	6		
		Kota Magelang	1,94	2	1,82	5	-1,34	3	-2,43	3	13		
	Subosuka wonosraten	Kab. Boyolali	0,77	1	1,40	4	-0,94	2	-1,06	2	9	68	
		Kab. Sukoharjo	1,08	2	0,88	3	-0,73	1	-1,27	3	9		
		Kab. Karanganyar	1,43	2	0,51	2	-1,72	3	-2,79	5	12		
		Kab. Wonogiri	2,15	3	1,02	3	-2,16	4	0,00	5	15		
		Kab. Sragen	1,55	2	0,64	2	-2,10	1	-0,69	2	7		
Kab. Klaten	0,69	1	0,76	2	-0,60	1	-0,48	1	5				
Kota Surakarta	1,47	2	0,94	3	-1,51	3	-1,65	3	11				

Hasil Pembobotan Gap Capaian Tahun 2021 dan 2023 di atas menunjukkan bahwa:

1. Indikator makro yang disepakati pada Rakortek antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Surakarta pada tanggal 15 -17 Maret 2022 menunjukkan bahwa quickwin Kawasan Pariwisata Borobudur memiliki tantangan yang

lebih besar daripada quickwin KI Brebes, KI terpadu Batang dan KI Kendal. Pada tahun 2020–2022 dilaksanakan sebanyak 42 paket kegiatan dengan total biaya sebesar Rp. 2,27 triliun, untuk pembiayaan 25 kegiatan yang telah selesai, 16 kegiatan tengah berlangsung (Ongoing) dan satu kegiatan dalam persiapan. Kementerian PUPR mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan (Sumarno, 2022). Pembangunan infrastruktur yang sedang dalam tahap penyelesaian diantaranya

- a. Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir Kawasan Strategis YIA pada DAS Serang dengan progres 50,7%,
  - b. Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir Sungai Bogowonto (52%),
  - c. Pengaman Muara Sungai Bogowonto Sisi Barat (70%),
  - d. Pengaman Muara Sungai Bogowonto Sisi Timur (89,5%), dan
  - e. Peningkatan Kapasitas TPA Regional Piyungan (98,8%).
  - f. Perencanaan Penataan Kampung Seni Borobudur di Kujon dan Pembangunan Jembatan dan Jalur Pejalan Kaki/ Boardwalk Tepi Kali Progo, Penataan Lansekap dan Fasad pada koridor Palbapang (Jl. Mayor Kusen).
2. Dari 8 (delapan) WP hanya terdapat 3 (tiga) WP yang paling mendapat tantangan terbesar adalah WP Kedungsepur, WP Subosukowonosraten, dan WP Purwomanggung. Tantangan tersebut tentunya harus didukung dengan kemudahan daerah untuk bersinergi dengan kegiatan KI Kendal dalam WP Kedungsepur dan intervensi Kota Surakarta sebagai PKN dalam WP Subosukowonosraten yang harus bersinergi dengan pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur dalam WP Purwomanggung.
  3. Terdapat kabupaten/kota yang mendapat tantangan untuk mencapai target yang paling besar yaitu Kabupaten Wonogiri, selanjutnya diikuti Kabupaten Kendal, Magelang, Wonosobo, Brebes, dan Kota Magelang. Kedepan kabupaten/kota mampu untuk menangkap peluang pembangunan sesuai arahan pada quickwin mana yang harus disinergikan .

### III. Analisis Pengukuran Optimis dan Pesimis Target Indikator Makro

Analisis Pengukuran Optimis dan Pesimis Target Indikator Makro mengacu pada evaluasi yang dilakukan terhadap kemungkinan pencapaian suatu target indikator makro dalam suatu proyek, program, atau rencana pembangunan. Dalam konteks ini, "optimis" mengacu pada skenario yang menggambarkan situasi terbaik di mana semua faktor berjalan sesuai rencana, sementara "pesimis" menggambarkan skenario terburuk di mana berbagai faktor penghambat atau risiko dapat terjadi.

Dalam pengukuran optimis, asumsi diasumsikan bahwa semua faktor pendukung dan kondisi lingkungan mendukung pencapaian target indikator makro. Semua kegiatan dan strategi diimplementasikan sesuai rencana, tanpa kendala atau hambatan yang signifikan. Analisis optimis membantu mengidentifikasi potensi keberhasilan maksimal dan menyajikan pandangan terbaik tentang pencapaian target. Sebaliknya, dalam pengukuran pesimis, asumsi mengambil pendekatan yang mempertimbangkan semua risiko dan hambatan yang mungkin terjadi. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau bencana alam dianggap sebagai potensi penghambat. Analisis pesimis membantu mengidentifikasi potensi kegagalan atau tantangan yang dapat mempengaruhi pencapaian target indikator makro.

1. Kajian beban optimis atau pesimis Quikwin dan WP per Quikwin

Kajian beban optimis atau pesimis untuk Quikwin (Quick Wins) dan Wilayah Pengembangan (WP) per Quikwin merujuk pada analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi proyeksi atau perkiraan beban, tanggung jawab, atau kebutuhan suatu Quikwin dalam suatu WP tertentu. Quikwin adalah inisiatif-proyek yang dirancang untuk memberikan hasil yang cepat dan terukur, sementara WP adalah wilayah yang dikembangkan dengan fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan. Analisis ini memberikan pemahaman tentang skenario terbaik dan terburuk yang mungkin dihadapi oleh Quikwin dan WP dalam konteks beban atau tanggung jawab yang harus mereka emban.

**Tabel 10:** Hasil Analisis beban optimis atau pesimis Quikwin dan WP per Quikwin

Wilayah Pengembangan	Jml Bobot Daya Lenting	Jml Bobot Tantangan	Pengukuran Optimis (+) / Pesimis (-)	Optimis (+) / Pesimis (-) / Imbang (0)
1	2	3	4 = 2-3	5
Bregasmalang	47	41	6	Optimis
Petanglong	41	21	20	Optimis
Barling mascakep	58	51	7	Optimis
Kedungsepur	77	64	13	Optimis
Wanarakuti	39	27	12	Optimis
Banglor	30	19	11	Optimis
Purwo manggung	65	58	7	Optimis
Subosuka wonosraten	86	68	18	Optimis

Quikwin	Jml Bobot Daya Lenting	Jml Bobot Tantangan	Pengukuran Optimis (+) / Pesimis (-)	Optimis (+) / Pesimis (-) / Imbang (0)
1	2	3	4 = 2-3	5
KI Brebes dan Batang	146	113	33	Optimis
KI Kendal	146	110	36	Optimis
Kawasan Pariwisata Borobudur	151	126	25	Optimis



**Gambar 2.** Proporsi Kasus DBD menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Hasil dari analisis pengukuran optimis dan pesimis digunakan untuk merancang rencana mitigasi. Dalam skenario optimis, perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan dalam skenario pesimis, perlu dipersiapkan rencana darurat atau alternatif. Ini membantu

organisasi atau proyek untuk lebih siap menghadapi tantangan dan meningkatkan fleksibilitas dalam pencapaian target indikator makro.

2. Kajian beban optimis atau pesimis Kabupaten/Kota per WP

Kajian beban optimis atau pesimis Kabupaten/Kota per Wilayah Prioritas merujuk pada analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi proyeksi atau perkiraan beban, tanggung jawab, atau kebutuhan suatu daerah tertentu dalam suatu wilayah prioritas. Beban dalam konteks ini dapat mencakup berbagai aspek seperti anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, atau tugas tertentu yang harus diemban oleh Kabupaten/Kota di wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Kajian ini dapat memiliki dimensi optimis dan pesimis yang memberikan gambaran tentang skenario terbaik dan terburuk yang mungkin dihadapi oleh Kabupaten/Kota.

**Tabel 11:** Hasil Analisis Beban Optimis Atau Pesimis Kabupaten/Kota per Wilayah Prioritas

QulkwIn	Wilayah Pengembangan	Kabupaten/ Kota	JML BOBOT DAYA LENTING	JML BOBOT TANTANGAN	PENGUKURAN OPTIMIS (+) / PESIMIS (-)	OPTIMIS (+) / PESIMIS (-) / IMBANG (0)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
KI Brebes	Bregasmalang	Kab. Brebes	7	13	-6	Pesimis
		Kab. Tegal	13	9	4	Optimis
		Kota Tegal	15	7	8	Optimis
		Kab. Pemalang	12	12	0	Imbang
	Petanglong	Kab Pekalongan	14	6	8	Optimis
		Kota Pekalongan	15	7	8	Optimis
		Kab. Batang	12	8	4	Optimis
	Barling mascakep	Kab Banjarnegara	11	11	0	Imbang
		Kab. Purbalingga	10	10	0	Imbang
		Kab. Banyumas	10	10	0	Imbang
		Kab. Cilacap	14	11	3	Optimis
	KI Kendal	Kedungsepur	Kab. Kebumen	13	9	4
Kab. Grobogan			14	10	4	Optimis
Kab. Demak			14	11	3	Optimis
Kab. Semarang			11	11	0	Imbang
Kab. Kendal			14	14	0	Imbang
Kota Semarang			11	7	4	Optimis
Wanarakuti		Kota Salatiga	13	11	2	Optimis
		Kab. Jepara	13	7	6	Optimis
		Kab. Kudus	10	11	-1	Pesimis
Banglor		Kab. Pati	16	9	7	Optimis
		Kab. Blora	16	8	8	Optimis
Kaws Pariwisata Borobudur		Purwo manggung	Kab. Rembang	14	11	3
	Kab. Purworejo		15	11	4	Optimis
	Kab. Wonosobo		10	14	-4	Pesimis
	Kab. Magelang		9	14	-5	Pesimis
	Kab. Temanggung		15	6	9	Optimis
	Subosuka wonosraten	Kota Magelang	16	13	3	Optimis
		Kab. Boyolali	12	9	3	Optimis
		Kab. Sukoharjo	12	9	3	Optimis
		Kab. Karanganyar	9	12	-3	Pesimis
		Kab. Wonogiri	11	15	-4	Pesimis
		Kab. Sragen	13	7	6	Optimis
		Kab. Klaten	14	5	9	Optimis
Kota Surakarta	15	11	4	Optimis		





5. Dari 35 Kabupaten/Kota yang terdapat 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota yang optimis, 6 (enam) Kabupaten/Kota yang pesimis, dan seimbang, 6 (enam) Kabupaten/Kota. Terhadap Kabupaten yang pesimis yaitu Kabupaten Brebes, Kudus, Wonosobo, Magelang, Karanganyar, dan Wonosobo. Dari keenam kabupaten hanya Kabupaten Brebes dan Magelang yang akan mendapat dukungan pusat sepenuhnya untuk mewujudkan peran *quickwin* untuk mengangkat PE sebesar 7 % Jawa Tengah.
6. Salah satu ciri kesiapan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program-program dalam RPJMD adalah tersedianya dokumen RTRW bukan hanya tingkat provinsi namun hingga Kabupaten/ Kota (skala 1:50.000) bahkan sesuai amanah UU Cipta Kerja hingga kedalaman RDTR (skala 1 : 5.000). Per tanggal 5 April 2022 sudah ditetapkan 24 Perda RTRW Kabupaten /Kota (67%), namun baru 16 Kabupaten/kota sudah aktif menyusun RDTR (45 %). Dokumen perencanaan penataan ruang akan mempermudah percepatan pembangunan fisik dan mengungkit kelancaran kegiatan non fisik yang berhubungan upaya perbaikan komponen pembentuk indikator makro.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dan kesimpulan, dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kajian evaluasi dapat berkembang sebagai instrumen dan arahan pengendalian pelaksanaan RPJMD dengan melihat perkembangan dari capaian *progress* indikator makro setiap tahunnya, termasuk untuk memberikan masukan terhadap kemungkinan tercapai atau harus mengalami penyesuaian target indikator makro..
2. Meninjau kembali untuk penyesuaian terhadap RPJMD, jika dalam tahun-tahun implementasinya ada kebijakan pemerintah pusat yang disepakati untuk percepatan pembangunan, sehingga terjamin sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan prioritas antara pusat dan daerah
3. Melakukan intervensi kebijakan indikator makro yang dijabarkan komponen pembentuknya dalam inisiasi program/kegiatan prioritas dalam Bab. VII RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang secara spasial diarahkan untuk terwujudnya dokumen Perencanaan Tata Ruang, baik dalam kedalaman RTRW maupun RDTR.
4. Menyusun RDTR untuk percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dan mendorong kepastian investasi sesuai amanah UU Cipta Kerja.
5. Memberi dukungan lebih bagi kabupaten/kota yang beban targetnya terlalu besar (pesimis tercapainya) daripada kemampuan daya lentingnya agar mampu bersinergi mengimbangi percepatan program kegiatan pusat yang disepakati dengan daerah untuk terkonsentrasi pada pembangunan *quickwin* dan PSN-nya.
6. Dengan adanya inisiasi kebijakan pusat seperti pembangunan kegiatan *quickwin* dan PSN, maka semua kegiatan daerah harus sinergi mendukung kebijakan tersebut, termasuk bagi daerah untuk merencanakan dan menyepakati hirarki target- target indikator makro yang sejalan dengan kebijakan RTRW Provinsi dan Kab./Kota, yang terinci sebagai kebijakan Struktur Tata Ruang dan Pola Pemanfaatan Ruang yang berbasis daya dukung dan tampung lingkungan hidup, serta memperhatikan kemampuan sumberdaya menuju Pengembangan Ekonomi Lokal.

**Daftar Pustaka**

- Abipraya. 2021. "Dukung KSPN Borobudur, Brantas Abipraya Menggarapnya Jadi Wisata Kelas Dunia." Pusat Media. 2021. <http://brantas-abipraya.co.id/id/berita/index/dukung-kspn-borobudur-brantas-abipraya-menggarapnya-jadi-wisata-kelas-dunia>.
- Bappeda Jateng. 2019, Perda Jateng No. 16 Tahun. n.d. "RTRW Prov. Jateng." Bappeda Prov. Jateng. <http://bappeda.jatengprov.go.id/dokumen-publik/dokumen-perencanaan/rtrwp-provinsi-jawa-tengah/>.
- BPS. 2022. "Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2022." BPS. 2022. <https://jateng.bps.go.id/publication/2022/02/25/431f4f4bbe02b47866b357cc/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2022.html>.
- Fahrika, A Ika, and Juliansyah Roy. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh The Impact of the Covid-19 Pandemic on Macroeconomic Developments in Indonesia and The Policy Response Taken." *Inovasi* 16 (2): 206–13. file:///C:/Users/asus/Downloads/8255-15843-1-PB.pdf.
- Jateng, Tribun. 2021. "Update Pembangunan Kawasan Industri Brebes Dan Batang." *TribunJateng .Com*. 2021. <https://berita.baca.co.id/54106695?origin=relative&pageId=9e6023a7-0c67-449d-a86f-c3aa8eda85ac&PageIndex=2>.
- Komalasari, Tia Dwitiani. 2022. "KEK Kendal Tarik Investasi Rp 27 Triliun Dan Serap 12 Ribu Tenaga Kerja." *Katadata*. 2022. <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/62dcd38b3dcf6/kek-kendal-tarik-investasi-rp27-triliun-dan-serap-12-ribu-tenaga-kerja>.
- KPPIP. 2021. "Kemenko Perekonomian Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Di Kawasan Industri Terpadu Batang." KPPIP. <https://kppip.go.id/berita/kemenko-perekonomian-dorong-percepatan-pembangunan-infrastruktur-penunjang-di-kawasan-industri-terpadu-batang/>.
- Modjo, M Ikhsan. 2020. "Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 103–16. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.117>.
- Muhyiddin, M. 2020. "Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4 (2): 240–52. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.
- Newswire. 2021. "PUPR Bangun Infrastruktur Terpadu di Kawasan Borobudur Senilai Rp2,27 Triliun." *Ekonomi Bisnis*. 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220620/45/1545498/pupr-bangun-infrastruktur-terpadu-di-kawasan-borobudur-senilai-rp-227-triliun>.
- Perda Jateng No. 5 Th. 2019. 2019. "RPJMD Prov. Jawa Tengah Th. 2018 -2023." Bappeda Prov. Jateng. 2019. <http://bappeda.jatengprov.go.id/dokumen-publik/dokumen-perencanaan/>.
- Pipit Ika Ramadhani. 2020. "Tengok Progres Pembangunan Kawasan Industri Batang Seluas 4.300 Ha." *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4396109/tengok-progres-pembangunan-kawasan-industri-batang-seluas-4300-ha>.
- Presiden, Peraturan. 2019. "Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo -Magelang-Temanggung,

- Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang.” JDIH. 2019. [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175980/Perpres\\_Nomor\\_79\\_Tahun\\_2019.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175980/Perpres_Nomor_79_Tahun_2019.pdf).
- . 2020a. “Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.” BPK. 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152706/perpres-no-109-tahun-2020>.
- . 2020b. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.” JDIH. 2020. [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176020/Perpres\\_Nomor\\_18\\_Tahun\\_2020.PDF](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176020/Perpres_Nomor_18_Tahun_2020.PDF).
- Stefy Thenu. 2020. “Konsorsium Percepat Pembangunan Kawasan Industri Batang.” Berita Satu. 2020. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/661063/konsorsium-percepat-pembangunan-kawasan-industri-batang>.
- Subarkah, Muhammad. 2021. “Pembangunan Kawasan Pariwisata Borobudur Highland Dipercepat.” Republika. 2021. <https://republika.co.id/berita/qv9of9385/network>.
- Sumarno, Nana. 2022. “Begini Konsep Penataan Kawasan Candi Borobudur Oleh Pemerintah.” Sukoharjo. 2022. <https://sukoharjonews.com/begini-konsep-penataan-kawasan-candi-borobudur-oleh-pemerintah/>.
- Yanita Petriella. 2021. “Infrastruktur Kawasan Wisata Borobudur Terus Dibenahi.” Bisnis.Com. <https://semarang.bisnis.com/read/20210521/536/1396333/infra-struktur-kawasan-wisata-borobudur-terus-dibenahi>.
- ZA, Dzaki Furqoni, Junaidi Junaidi, and Adi Bhakti. 2019. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Sumatera.” E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan 8 (3): 170–83. <https://doi.org/10.22437/jels.v8i3.11994>.